

**IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003
BAGI PEREMPUAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF
DAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KABUPATEN BANYUMAS**

**THE IMPLICATION OF THE ACT NUMBER 12/2003 FOR WOMEN CANDIDATES OF
PARLIAMANT MEMBER AND WOMEN REPRESENTATIVE IN LEGISLATIVE BODY OF
BANYUMAS DISTRICT**

Oleh: Tri Wuryaningsih

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jenderal Soedirman

(Diterima: 9 Januari 2006, disetujui: 24 Maret 2006)

ABSTRACT

General Election 2004 is the most monumental one compared with previous ones. The Act Number 12/2003 underlying the general election which has special implication for women, such as Article 65 paragraph 1, Article 107 paragraph 2, and Article 46 of The Act Number 12/2003. For those reason, the representation of women in the legislative institution. Results of the research showed: First, commitment of the political parties in Banyumas Regency against regulation of women quota was still low, indicating by the many political parties (11) did not fulfill this regulation and place most women legislative member candidates in shoes sort number. Second, fulfillment of the elected candidates was based on sort number of Legislative Member Candidate Sort List, due to none of the candidates who fulfill regulation of minimum vote. Third, because fulfillment of the elected candidates was based on sort number of Legislative Member Candidate Sort List, 15 candidates with the most vote gain (first rank) did not elected to be member of legislative. Fourth, trust of community to women candidates was still low, indicating by the little women candidates (six) who gain the most vote (first and second ranks). Fifth, based on the distribution, only one Electoral Area which fulfill the quota regulation and fulfillment of the candidates was less adjusted with the political parties constituent basis of the relating candidates.

Key words: chair, gain, general election, political parties

PENDAHULUAN

Upaya kuat untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif terhadap penyalahgunaan mandate rakyat oleh politisi, baik pejabat pemerintah maupun anggota parlemen, telah mendorong tumbuh kembangnya kehidupan politik ke arah demokrasi partisipatoris. Mekanisme pemilihan langsung untuk lembaga eksekutif maupun legislative, baik di tingkat local maupun nasional, merupakan salah satu komponen penting demokrasi partisipatoris. Dengan menerapkan sistem pemilihan langsung, rakyat diharapkan akan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang aktif berpartisipasi dalam menentukan agenda pembangunan negara,

dan bukan hanya sebagai obyek dari pembangunan itu sendiri.

Seiring dengan kuatnya keinginan masyarakat untuk mewujudkan demokrasi partisipatoris, pada Pemilu 2004 pemerintah telah mencoba melaksanakan pemilihan umum secara langsung, yang sangat berbeda dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Oleh karenanya, banyak hal yang menarik untuk dikaji, antara lain implementasi UU No 12 Tahun 2003 yang melandasi pelaksanaan Pemilu 2004. Namun, peneliti hanya mengkaji beberapa aturan main yang memiliki implementasi khusus bagi para calon anggota legislative perempuan, yaitu:

1. Pasal 65 ayat 1 UU No. 12 Tahun 2003

yang mengatur tentang keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislative atau yang lebih dikenal dengan pasal kuota perempuan.

1. Pasal 107 ayat 2 UU No. 12 Tahun 2003, yang lebih dikenal dengan pasal Bilangan Pembagi Pemili (BPP).
2. Pasal 45 UU No. 12 Tahun 2003, yang mengatur tentang pembagian Daerah Pemilihan (DP).

Berbagai kalangan menyadari, keterlibatan perempuan di bidang politik masih sangat lemah, antara lain ditunjukkan oleh sedikitnya jumlah anggota legislative perempuan. Namun, bukan hal yang mudah mendesak ide keterwakilan perempuan dilembaga legislative kepada berbagai pihak. Di kalangan partai politik (parpol) juga belum ada kesamaan pandang tentang isu kuota perempuan. Penelitian Wuryaningsih, dkk (2003) menunjukkan, dari lima parpol besar pemenang Pemilu 1999 di Kabupaten Banyumas, hanya tiga parpol yang menunjukkan respons positif, satu parpol menyatakan belum tahu, dan satu parpol secara tegas menyatakan tidak setuju.

Selain itu, pasal 65 ayat 1 yang mengatur persoalan tersebut terlihat sebagai pasal karet, karena tidak secara tegas mengikat pihak-pihak yang berkepentingan. Pasal 107 yang mengatur BPP dan pasal 46 yang mengatur tentang pembagian DP, juga dianggap sebagai pasal yang turut mempersulit perempuan duduk di lembaga legislative. Untuk itu, masalah penelitian yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implikasi pasal 65 ayat 1, pasal 107, dan pasal 46 UU No 12 tahun 2003 bagi perempuan calon anggota legislative di Kabupaten Banyumas?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyumas karena pada Pemilu 2004 jumlah calon anggota legislatif (caleg) perempuannya relatif sedikit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei (deskriptif) dengan mendasarkan pada data sekunder yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Banyumas pada tanggal 14 April 2004 mengenai “Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu, dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Banyumas - untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Banyumas Pemilu 2004.” Berdasarkan analisis terhadap dokumen tersebut akan dapat diketahui parpol yang memiliki komitmen terhadap isu keterwakilan perempuan dalam lembaga legislative, keterwakilan caleg perempuan pada masing-masing DP, caleg perempuan yang terpilih dan asal parpolnya, serta seorang calon terpilih karena banyaknya dukungan suara atau karena posisinya dalam daftar nomor urut calon. Untuk memperdalam analisis, juga akan digunakan sumber informasi lain seperti media massa, jurnal, hasil-hasil penelitian, serta literatur yang relevan dengan topik penelitian ini. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan distribusi frekuensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Banyumas pada Pemilu Legislatif Tahun 2004

Pada Pemilu Legislatif 2004 jumlah penduduk Kabupaten Banyumas yang mempunyai hak pilih sebesar 1.514.031 jiwa,

namun yang menggunakan hak pilihnya 1.069.993 jiwa (70,67 persen) yang tersebar di 27 kecamatan dan 330 desa. Jumlah tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 3.971, terdiri dari 3.955 TPS biasa dan 16 TPS khusus. Pada pelaksanaan pemilu tersebut, Kabupaten Banyumas dibagi ke dalam lima DP yaitu: DP Banyumas I (Kecamatan Lumbir, Wangon, Ajibarang, Pekuncen, dan Gumelar) memperebutkan sembilan kursi; DP Banyumas II (Kecamatan Jatilawang, Rawalo, Purwojati, Kebasen, dan Patikraja) memperebutkan tujuh kursi; DP III (Kecamatan Cilongok, Karanglewas, Kedungbanteng, Baturaden, dan Sumbang) memperebutkan 10 kursi; DP Banyumas IV (Kecamatan Purwokerto Utara,

Purwokerto Barat, Purwokerto Timur, Purwokerto Selatan, Sokaraja, dan Kembaran) memperebutkan 11 kursi; dan DP Banyumas V (Kecamatan Banyumas, Kalibagor, Somagede, Sumpiuh, Kemranjen, dan Tambak) memperebutkan delapan kursi (Laporan KPUD Kabupaten Banyumas).

Parpol peserta Pemilu 2004 di Kabupaten Banyumas berjumlah 23, dengan perolehan suara masih didominasi oleh empat parpol pemenang Pemilu 1999, yaitu PDI-Perjuangan, Partai Golka, PKB, dan PAN. Berdasarkan perolehan suara pada Pemilu 2004, komposisi anggota legislatif di Kabupaten Banyumas pada periode 2004 - 2009 adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Komposisi Anggota Legislatif Kabupaten Banyumas Periode 2004 - 2009

No.	Asal Partai Politik	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	PDI Perjuangan	12	4	16
2.	Partai Golkar	5	3	8
3.	Partai Kebangkitan Bangsa	8	0	8
4.	Partai Amanat Nasional	5	0	5
5.	Partai Demokrat	4	0	4
6.	Partai Persatuan Pembangunan	3	0	3
7.	Partai Keadilan Sejahtera	1	0	1
Jumlah		38	7	45

Sumber: KPUD Kabupaten Banyumas 2004

Tabel diatas menggambarkan, dari 45 orang anggota legislatif Kabupaten Banyumas, tujuh orang di antaranya adalah perempuan, Angka ini menunjukkan peningkatan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya yang hanya berjumlah empat orang. Meski demikian, masih belum sesuai dengan komitmen kuota perempuan. Sejak awal proses pencalonan anggota legislatif di Kabupaten Banyumas,

jumlah caleg perempuan memang relatif sedikit, yakni hanya 106 orang dari 383 orang yang terdaftar di KPUD Kabupaten Banyumas (27,68 persen).

B. Komitmen Partai Politik di Kabupaten Banyumas Terhadap Kuota Perempuan

Menurut Drude Dahlerup (dalam Pambudy, Kompas, 9 Februari 2004), Ada empat alasan utama mengapa kuota perempuan di

lembaga legislatif penting: 1) Perempuan adalah separuh dari populasi masyarakat; 2) Perempuan memiliki pengalaman biologis, sosial dan kultural yang berbeda dari laki-laki; 3) Perempuan dan laki-laki memiliki kepentingan yang sebagian berbeda sehingga laki-laki tidak bisa mewakili perempuan; 4) Perempuan di lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif bisa menjadi peran model untuk perempuan sehingga bisa menjadi contoh bagi mereka untuk aktif berperan di ruang publik. Akan tetapi, sejak awal isu tentang kuota perempuan telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, tak terkecuali parpol. Di tengah debatan tersebut, tanpa adanya komitmen yang sungguh-sungguh dari parpol, upaya mendesakkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tidak akan berhasil

Para elit PKB Partai Golkar, PAN, dan PPP Kabupaten Banyumas sangat setuju dengan kebijakan kuota perempuan. Sementara itu, PDI Perjuangan menyatakan tidak setuju dengan kuota perempuan dengan alasan mengapa harus dibatasi 30 persen, jika partai yang bersangkutan memiliki lebih dari 50 persen sumber daya perempuan yang berkualitas (Wuryaningsih, dkk., 2003). Namun, respon positif dari empat parpol tersebut ternyata tidak paralel dengan kenyataan yang ada. Tidak ada satu pun dari parpol tersebut yang memenuhi kuota perempuan dalam pencalegan pemilu 2004, termasuk PDI Perjuangan. Proposisi caleg perempuan di PDI Perjuangan (24,00%), P.Golkar (25,00%), PKB (20,00%), PAN (24,00%), dan PPP (15,79%). Dari 23 parpol peserta Pemilu di Kabupaten Banyumas, hampir separuhnya (11 parpol) tidak

memenuhi ketentuan kuota perempuan (lihat dalam tabel 2).

Para elite PDI-P, P. Golkar, PKB, PAN, dan PPP mengemukakan bahwa tidak terpenuhinya kuota perempuan, karena: kurangnya kemauan dari para perempuan sendiri untuk mencalonkan diri sebagai caleg, aturan partai yang membatasi kader perempuan yang ingin mencalonkan diri (seperti syarat sarjana, persoalan nomor urut), sumber daya perempuan di partai yang pas-pasan, dan tidak ada dana untuk mencalonkan diri sebagai caleg. Namun demikian, para kader perempuan parpol menyatakan bahwa untuk terpenuhinya kuota perempuan lebih disebabkan oleh political will dari elit parpol tersebut (Wuryaningsih, dkk, 2004).

Menurut Seda (2004) upaya meningkatkan peran serta perempuan dalam kehidupan berpolitik Indonesia memang menghadapi berbagai kendala, yaitu : 1) masih kuatnya ideologi patriarki sehingga dikotomi ranah publik dan domestik masih tetap dianut yang berimplikasi pada lemahnya akses dan kesempatan perempuan; 2) mobilitas perempuan di dalam parpol sangat lamban karena ketidakseimbangan antara kaum perempuan dan laki-laki dari segi kualitas, kuantitas, serta ketidaksetaraan akses dan kesempatan perempuan di dalam masyarakat maupun parpol; 3) Kehendak kaum perempuan untuk berperan serta secara aktif sebagai anggota parpol belum optimal karena adanya citra yang kurang menunjang dari kondisi politik secara umum dan parpol itu sendiri; 4) secara internal mekanisme yang digunakan partai, dari segi potensi, kualifikasi, dan kapabilitas adalah berdasarkan

Tabel 2. Jumlah Caleg Kabupaten Banyumas Menurut Jenis Kelamin dan Asal Parpol Pada Pemilu 2004

No.	Nama Parpol	Caleg		Jumlah Caleg	Proporsi Caleg Perempuan (%)	Keterangan
		Laki-laki	Perempuan			
1.	PNI Marhaenisme	11	5	16	31,25	MK
2.	P. Buruh Sos Dem	1	1	2	50,00	MK
3.	P. Bulan Bintang	8	4	12	33,33	MK
4.	P. Merdeka	3	1	4	25,00	TMK
5.	P P P	19	3	22	15,79	TMK
6.	P P Dem Kbgsn	1	1	2	50,00	MK
7.	P P Ind Baru	2	1	3	33,33	MK
8.	P N B K	6	2	8	25,00	TMK
9.	P Demokrat	17	9	26	34,62	MK
10.	P K P I	6	5	11	45,45	MK
11.	P P D I	12	4	16	25,25	TMK
12.	P P N U I	3	2	5	40,00	MK
13.	P A N	19	6	25	24,00	TMK
14.	P K P B	12	7	19	36,83	MK
15.	P K B	28	7	35	20,00	TMK
16.	P K S	18	10	28	35,71	MK
17.	P B R	10	3	13	27,08	TMK
18.	PDI-Perjuangan	38	12	50	24,00	TMK
19.	P Damai Sejahtera	5	0	5	0	TMK
20.	P. Golkar	36	12	48	25,00	TMK
21.	P Patriot PS	6	4	10	40,00	MK
22.	P Serikat Indonesia	5	6	11	54,54	MK
23.	P Persatuan Daerah	11	1	12	8,33	TMK
	Jumlah	277	106	383	27,68	

Sumber: KPUD Kabupaten Banyumas 2004, diolah

Keterangan: MK: Memenuhi Kuota; TMK: Tidak Memenuhi kuota.

sisi pandang kaum laki-laki saja. Implikasinya kaum perempuan masih harus membuktikan diri di dalam parpol dengan ukuran yang tidak objektif dan netral, karena menggunakan patokan-patokan kaum laki-laki; 5) hukum dan peraturan perundang-undangan yang tidak berkeadilan gender, misalnya undang-undang tidak yang tidak memperbolehkan PNS menjadi anggota parpol.

C. Posisi Caleg Perempuan Dalam Daftar Calon Anggota Legislatif

Pasal 107 ayat 2 UU No. 12 tahun 2003 menyebutkan: “a) Nama calon yang mencapai angka bilangan pembagi pemilih (BPP, jumlah

suara sah dibagi kursi yang diperebutkan) ditetapkan sebagai calon terpilih; b) Nama calon yang tidak mencapai angka BPP, penetapan calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut pada daftar calon di daerah pemilihan yang bersangkutan”. Menurut Soetjipto (2005), ketentuan tersebut menyiratkan berlakunya sistem proporsional yang setengah hati dalam Pemilu 2004. Adanya ketentuan yang mengatur tentang “caleg yang tidak mencapai BPP, maka penentuan calon terpilih akan dilakukan melalui daftar urutan caleg” memberikan peran yang besar bagi elite parpol dalam penempatan kandidat pada daftar urutan caleg. Implikasinya

bagi perempuan, untuk dapat terpilih sebagai anggota legislatif, mereka harus menjadi kandidat yang ditempatkan pada peringkat atas.

Berikut informasi mengenai penempatan caleg perempuan di Kabupaten Banyumas dalam Daftar Urutan Calon.

Tabel 3. Jumlah Caleg Perempuan di Kabupaten Banyumas Berdasarkan Asal Parpol, Nomor Urut Calon, dan Daerah Pemilih

Nama Parpol	Nomor Urut Caleg Perempuan					Jumlah
	DP I	DP II	DP III	DP IV	DP V	
1. PNI Marhaenisme	-	2,3	-	2,4	3	5
2. P. Buruh Sos Dem	-	-	1	-	-	1
3. P. Bulan Bintang	2	-	2	4	3	4
4. P. Merdeka	-	-	-	-	1	1
5. P P P	-	-	2,4	-	5	3
6. P P Dem Kbgns	-	-	-	-	1	1
7. P P Ind Baru	-	-	-	1	-	1
8. P N B K	-	1	1	-	-	2
9. P Demokrat	5	4,5	5	3,5,7	3,4	9
10. P K P I	1	1	2	3	2	5
11. P P D I	4	2	2	-	1	4
12. P P N U I	-	-	-	1	1	2
13. P A N	4	5	5	2,8	3	6
14. P K P B	3	3,4	1,3	2	3	7
15. P K B	-	2,6,7	6	6,7	6	7
16. P K S	4,6	2,4	1,6	2,5	3,6	10
17. P B R	-	3	-	4	1	3
18. PDI-Perjuangan	3	1,2,8	8,9,11	7,10	2,8,9	12
19. P Damai Sejahtera	-	-	-	-	-	0
20. P. Golkar	3,10	2,5	2,6	2,4,5,10	1,3	12
21. P Patriot PS	2	2	1	1,3	-	4
22. P Serikat Indonesia	-	1,2,3	2	2	-	6
23. P Persatuan Daerah	-	-	-	1	-	1
Jumlah	12	25	21	27	21	106

Sumber: KPUD Kabupaten Banyumas 2004, diolah

tabel tiga menunjukkan, dari 106 orang caleg perempuan, hanya 44 orang yang ditempatkan pada nomor urutan atas (satu dan dua), dengan rincian tiga orang di DP I, 12 orang di DP II, 11 orang di DP III, 10 orang di DP IV, dan delapan orang di DP V, Dan dari 23 parpol peserta pemilu di Kabupaten Banyumas, hanya Partai Demokrat dan PDS yang tidak menempatkan satu caleg perempuan pun pada nomor urutan satu dan dua dalam Daftar Urutan Calon.

Ketidaktegasan Pasal 107 ayat 2 UU Pemilu Tahun 2003 ternyata memang telah menjadi kendala tersendiri bagi caleg perempuan. Selain itu, pada proses perebutan nomor urutan atas oleh para caleg, terjadi kekerasan berbasis gender. Beberapa caleg perempuan mengungkapkan bahwa mereka telah diperlakukan secara tidak adil oleh para elite parpol mereka, di antaranya pengeseran nomor urutan yang semula berada pada urutan atas

menjadi nomor urutan sepatu tanpa alasan yang jelas. Bagaimanapun, bentuk ketidakadilan gender berupa subordinasi (perempuan dianggap tidak penting) masih harus dialami oleh perempuan (wuryaningsih, dkk., 2004),

D. “Legitimasi” Caleg Terpilih pada Pemilu 2004 di Kabupaten Banyumas

Secara nasional, pada Pemilu 2004 sangat jarang caleg laki-laki maupun perempuan yang mampu memenuhi BPP dan “membawa kursi” sendiri. Di Kabupaten Banyumas, dari 383 orang caleg tidak ada seorangpun yang memenuhi angka BPP sehingga penetapan caleg terpilih berdasarkan nomor urut pada Daftar

Calon di DP yang bersangkutan. Namun demikian, yang penting untuk dicermati adalah apakah para caleg terpilih merupakan tokoh yang benar-benar dikehendaki atau memiliki popularitas di masyarakat. Persoalan ini dapat diketahui dari rangking perolehan suara masing-masing caleg terpilih. Dengan membandingkan ranking perolehan suara dan nomor urut caleg terpilih akan dapat diketahui apakah para caleg yang ditempatkan pada nomor urut atas dalam daftar caleg benar-benar memiliki popularitas di masyarakat. Secara rinci, informasi tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

Tabel 4. Caleg Terpilih Berdasarkan Nomor Urut Caleg, Ranking Perolehan Suara, dan Jenis Kelamin

Nama Partai	Daerah Pemilihan	No. Urut Caleg dan Ranking Perolehan Suara				Jumlah Kursi
		I (L/P)	II (L/P)	III (L/P)	IV (L/P)	
PDI-P	I	5 (L)	2 (l)	10 (P)	-	3
	II	3 (P)	2 (P)	-	-	2
	III	3 (L)	2 (L)	6 (L)	1 (L)	4
	IV	3 (L)	2 (L)	5 (L)	1 (L)	4
	V	5 (L)	3 (P)	2 (L)	-	3
P. Golkar	I	6 (L)	3 (L)	-	-	2
	II	6 (L)	2 (P)	-	-	2
	III	5 (L)	-	-	-	1
	IV	3 (L)	5 (P)	-	-	2
	V	6 (P)	-	-	-	1
PKB	I	1 (L)	2 (L)	-	-	2
	II	2 (L)	-	-	-	1
	III	4 (L)	2 (L)	-	-	2
	IV	3 (L)	1 (L)	-	-	2
	V	2 (L)	-	-	-	1
PAN	I	2 (L)	-	-	-	1
	II	4 (L)	-	-	-	1
	III	1 (L)	-	-	-	1
	IV	1 (L)	-	-	-	1
	V	1 (L)	-	-	-	1
P. Demokrat	I	2 (L)	-	-	-	1
	III	1 (L)	-	-	-	1
	IV	1 (L)	-	-	-	1
	V	1 (L)	-	-	-	1
PPP	II	3 (L)	-	-	-	1
	III	1 (L)	-	-	-	1
	V	1 (L)	-	-	-	1
PKS	IV	1 (L)	-	-	-	1
Jumlah						45

Sumber: KPUD Kabupaten Banyumas 2004, diolah

Tabel empat menunjukkan, dari 45 orang caleg di Kabupaten Banyumas yang terpilih dalam Pemilu 2004, hanya 24 (53,33%) caleg yang mendapatkan dukungan suara pemilih. Artinya, terdapat konsistensi antara nomor urut yang mereka tempati dengan jumlah suara yang diperoleh. Terpilihnya 24 orang caleg tersebut, selain karena menduduki nomor urut atas dalam daftar calon, mereka juga memperoleh ranking teratas (satu, dua) dalam perolehan suara, kecuali caleg dari PDI-P (terdapat tiga caleg terpilih yang memperoleh ranking tiga, karena partai tersebut mampu merebut lebih dari dua kursi di DP I, III, IV dan V). Sedangkan 21 orang caleg lain yang terpilih, semata-mata diuntungkan oleh posisi mereka di nomor urut

atas dalam daftar calon, bukan karena popularitas caleg tersebut di masyarakat. Hal ini menunjukkan, para caleg yang ditempatkan pada nomor urut atas dalam daftar calon dan kemudian terpilih menjadi anggota legislatif tersebut kurang legitimated. Penetapan caleg terpilih berdasarkan nomor urut dalam daftar calon, telah mengakibatkan 15 orang caleg di Kabupaten Banyumas dengan perolehan suara terbanyak tidak terpilih menjadi anggota legislatif (lihat tabel enam) Tabel lima berikut menunjukkan caleg perempuan di Kabupaten Banyumas yang terpilih menjadi anggota legislatif pada Pemilu 2004 semuanya diuntungkan karena posisi mereka yang berada di nomor urut atas.

Tabel 5. Caleg Perempuan Terpilih Berdasarkan Asal Partai, Nomor Urut Calon, Ranking Perolehan Suara, dan Daerah Pemilihan

No	Nama Caleg	Asal Partai	No. Urut	Ranking Peroleh. Suara	DP
1.	LPAS Widyaningrum	PDI-Perjuangan	3	10	I
2.	Shinta Laila, SH	PDI-Perjuangan	1	3	II
3.	Sri Handayani, B.Sc.	PDI-Perjuangan	2	2	II
4.	Dra. Laely Rofiqoh	Partai Golkar	2	2	II
5.	Sri Hastuti Rony Pesik	Partai Golkar	2	5	IV
6.	Werdiningsih	PDI-Perjuangan	2	3	V
7.	Hj. Tri Yuliarsih Munadi	Partai Golkar	1	6	V

Sumber: KPU Kabupaten Banyumas 2004, diolah

E. Kepercayaan Masyarakat Terhadap Caleg Perempuan

Melalui implementasi pasal 65 ayat 1 UU Pemilu tahun 2003, diharapkan dapat membawa “angin segar” bagi perempuan untuk berkiprah di bidang politik. Namun demikian, perempuan masih banyak menghadapi kendala agar dapat terpilih sebagai anggota legislatif. Kepercayaan masyarakat (tak terkecuali perempuan) terhadap caleg perempuan masih

rendah. Di Kabupaten Banyumas, dari 106 orang caleg perempuan yang terdaftar pada Pemilu 2004, hanya enam orang yang mendapat suara terbanyak (satu dan dua). Hal ini membuktikan bahwa pemilih perempuan di Kabupaten Banyumas juga belum mempercayakan suaranya kepada caleg perempuan. Gambaran secara jelas mengenai kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Caleg yang Memperoleh Suara Terbanyak I dan II Berdasarkan Asal Parpol, Daerah Pemilihan, Nomor Urut, dan Jenis Kelamin

Nama Partai	DP	No. Urut caleg dengan perolehan suara terbanyak				Jumlah kursi	Keterangan
		I	L/P	II	L/P		
PDI-P	I	7	L	2	L	3	III (10/L)
	II	5	L	2	P	2	
	III	4	L	2	L	4	III (1/L); IV (10/L)
	IV	4	L	2	L	4	III (3/L); IV (6/L)
	V	6	L	3	L	3	III (2/P)
P. Golkar	I	4	L	7	L	2	
	II	8	L	2	P	2	
	III	2	P	7	L	2	
	IV	3	L	4	L	2	
	V	2	L	5	L	2	
PKB	I	1	L	2	L	2	
	II	2	L	1	L	1	
	III	4	L	2	L	2	
	IV	2	L	3	L	2	
	V	3	L	1	L	1	
PAN	I	2	L	1	L	1	
	II	2	L	4	L	1	
	III	1	L	2	L	1	
	IV	1	L	2	P	1	
	V	1	L	2	L	1	
P. Demokrat	I	3	L	1	L	1	
	III	1	L	2	L	1	
	IV	1	L	2	L	1	
	V	1	L	3	P	1	
PPP	II	2	L	3	L	1	
	III	1	L	3	L	1	
	V	1	L	2	L	1	
PKS	IV	1	L	3	L	1	
Jumlah		45		45		45	

Sumber: KPUD Kabupaten Banyumas 2004, diolah

Masih rendahnya dukungan atau kepercayaan masyarakat terhadap caleg perempuan membutuhkan upaya strategis untuk mengatasinya. Upaya untuk memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif harus dilakukan dengan berbagai cara: 1) melobi berbagai partai politik agar dalam menyusun daftar calon legislatif tetap meletakkan caleg perempuan di posisi jadi, yang diikuti dengan tekanan publik melalui media massa; 2) memperkuat jaringan perempuan di

tingkat lokal terutama pada kabupaten/kota yang terdiri dari politisi, anggota DPRD, anggota KPPI daerah, para aktivis, media massa, dan akademisi dan pihak lain yang berkeprihatinan sama; 3) usaha yang sungguh-sungguh untuk melakukan amandemen baik pada UU partai Politik maupun UU Pemilu, agar ada ketentuan yang jelas dan mengikat secara hukum agar proses pencalonan caleg di semua tingkatan wajib menerapkan minimal 30 persen keterwakilan perempuan (Seda : 2004).

F. Persebaran Caleg Perempuan di Masing-masing Daerah Pemilihan

Dengan mengamati data proporsi caleg di Kabupaten Banyumas berdasarkan jenis kelamin dan DP, akan diperoleh informasi tentang persebaran caleg perempuan di Kabupaten Banyumas, informasi tentang terpenuhi atau tidaknya kuota perempuan di setiap DP, juga dapat ditelusuri tingkat persaingan masing-masing caleg dalam memperebutkan kursi yang ada di daerah pemilihannya. Selain itu, juga dapat dianalisis tentang kesesuaian penempatan caleg dengan daerah basis konstituennya. Penempatan caleg perempuan, sekalipun diposisikan pada nomor urut atas (satu dan dua), namun jika tidak sesuai dengan daerah basis konstituennya, posisi nomor urut atas tidak menjamin pasti terpilihnya caleg

menjadi anggota legislative. Selain itu, besar kecilnya jumlah kursi yang diperebutkan di setiap DP juga sangat mempengaruhi peluang setiap caleg untuk bisa menjadi anggota legislatif.

Berdasarkan data pada tabel sembilan, dapat dilihat bahwa dari 106 caleg perempuan di Kabupaten Banyumas, 12 per (16,9%) orang di antaranya berada di DP I, 25 (37,31%) orang berada di DP II, 21 (27,63%) orang berada di DP III, 27 (28,12%) orang di DP IV, dan 21 (28,77%) orang berada di DP V. Sementara itu, hanya tiga orang caleg perempuan di DP I ditempatkan pada nomor urut atas (satu dan dua), 12 orang di DP II, 11 orang di DP III, 10 orang di DP IV, dan delapan orang di DP V. Informasi secara rinci mengenai hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. Proporsi Caleg di Kabupaten Banyumas Berdasarkan Asal Parpol, Jenis Kelamin, dan Daerah Pemilihan

Nama Partai	Jumlah Caleg Menurut Jenis Kelamin										Jumlah Caleg
	DP I		DP II		DP III		DP IV		DP V		
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1. PNI Marhaenisme	2		1	2	3		3	2	3	1	16
2. P. Buruh Sos Dem	-					1	1				2
3. P. Bulan Bintang	1	1	1		1	1	3	1	2	1	12
4. P. Merdeka	1				1		1			1	4
5. P P P	2		4		3	2	5		5	1	22
6. P P Dem Kbgsn					1					1	2
7. P P Ind Baru	1							1	1		3
8. P N B K	2			1	1	1	2		1		8
9. P Demokrat	4	1	3	2	4	1	4	3	2	2	26
10. P K P I	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	11
11. P P D I	3	1	2	1	2	1	3		2	1	16
12. P P N U I	1		1		1			1		1	5
13. P A N	3	1	4	1	4	1	6	2	2	1	25
14. P K P B	3	1	2	2	1	2	3	1	3	1	19
15. P K B	7		4	3	5	1	5	2	7	1	35
16. P K S	4	2	2	2	4	2	4	2	4	2	28
17. P B R	2		2	1	2		3	1	1	1	13
18. PDI-Perjuangan	9	1	5	3	8	3	10	2	6	3	50
19. P Damai Sejahtera	1		1		1		1		1		5
20. P. Golkar	8	2	6	2	7	2	9	4	5	2	48
21. P Patriot PS	1		1	1	1	1	1	2	2		10
22. P Serikat Indonesia	1	1		3	1	1	1	1	2		11
23. P Persatuan Daerah	2		2		3		2	1	2		12
Jumlah	59	12	42	25	55	21	69	27	52	21	383
Persentase	81,1	16,9	62,7	37,3	72,4	27,6	71,9				

Sumber: KPUD Kabupaten Banyumas 2004, diolah

Berdasarkan perolehan kursinya, dari sembilan kursi yang diperebutkan di DP I, hanya satu kursi yang diperoleh caleg perempuan. Di DP II caleg perempuan memperoleh tiga kursi dari tujuh kursi yang diperebutkan. Sementara itu, caleg perempuan tidak memperoleh kursi sama sekali di DP III. Di DP IV, caleg perempuan memperoleh satu kursi dari 11 kursi yang diperebutkan, dan dari delapan kursi yang diperebutkan di DP V, caleg perempuan memperoleh dua kursi. Hal yang menarik untuk dikaji dari data tersebut adalah, tidak diperolehnya kursi di DP III oleh caleg perempuan padahal mereka cukup banyak (21 orang) ditempatkan di DP tersebut. Bahkan 11 orang diantaranya menduduki posisi no urutan atas dalam Daftar Urutan Caleg. jika ditelusuri lebih jauh, DP III adalah daerah basis konstituen PDI-P dan PKB. Namun, dua parpol besar tersebut tidak menempatkan satu pun caleg perempuan di nomor urutan atas. Justru parpol-parpol lain (PBSD, PNBK, PKPB, PKS, dan Partai Patriot yang tidak memiliki basis konstituen di DP tersebut yang menempatkan caleg perempuan pada nomor urutan atas. Akhirnya, kesesuaian penempatan caleg perempuan dengan basis konstituen sangat menjadi penentu terpilih atau tidaknya seorang caleg untuk menjadi anggota legislatif.

KESIMPULAN

1. Komitmen parpol di Kabupaten Banyumas terhadap ketentuan kuota perempuan dan isu keterwakilan perempuan masih rendah. Indikator yang menunjukkan hal tersebut: (a) dari 23 parpol peserta Pemilu 2004, 11 parpol di antaranya tidak memenuhi ketentuan kuota perempuan, termasuk PDI-P, P. Golkar, PKB, PAN, dan PPP sebagai pemenang pemilu tahun 1999; (b) dari 106 orang caleg perempuan di Kabupaten Banyumas, hanya 44 orang yang ditempatkan pada nomor urutan atas (satu dan dua) dalam Daftar Urutan Calon.
2. Dari 383 orang caleg di Kabupaten Banyumas yang terdaftar pada Pemilu 2004, tidak satu pun caleg laki-laki maupun perempuan yang memenuhi ketentuan BPP sehingga caleg terpilih pada Pemilu 2004 ditetapkan berdasarkan nomor urutan pada Daftar Calon di DP yang bersangkutan. Oleh karenanya, terdapat 15 orang caleg di Kabupaten Banyumas dengan perolehan suara terbanyak (ranking satu) tidak terpilih menjadi anggota legislatif.
3. Dari 45 caleg di Kabupaten Banyumas yang terpilih dalam pemilu 2004, hanya 24 orang yang mendapatkan dukungan suara pemilih. Sementara 21 orang caleg lainnya (termasuk semua caleg perempuan) semata-mata diuntungkan oleh posisi mereka yang berada di nomor urutan atas dalam Daftar Urutan Calon.
4. Dukungan masyarakat Kabupaten Banyumas terhadap caleg perempuan masih rendah. Hal ini terlihat dari 106 orang caleg perempuan, hanya enam orang yang mendapatkan suara terbanyak (satu dan dua).
5. Berdasarkan persebarannya, dari lima DP yang ada di Kabupaten Banyumas, hanya satu DP yang memenuhi ketentuan kuota perempuan. Selain itu, penempatan caleg-caleg perempuan juga kurang disesuaikan dengan basis konstituennya, sehingga kursi yang bisa diraih oleh caleg perempuan sangat sedikit. Bahkan di DP II, caleg perempuan tidak mendapat kursi, walaupun ada 11 orang caleg perempuan yang menduduki posisi nomor urutan atas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2003, Undang-Undang No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Jakarta
- _____, 2004, Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu, dan penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Banyumas – untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Banyumas Pemilu 2004, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, Purwokerto 14 April 2004
- Pambudy, Ninuk M., 2004, Keterwakilan Perempuan di Politik Cuma Janji Parpol, dalam Kompas, 9 Februari 2004
- Seda, Francisia SSE, 2004, Strategi Partai Politik Meningkatkan Peran Serta Perempuan, dalam Basis, Nomor 03 – 04 Tahun Ke 53, Maret – April
- Soetjipto, Ani, 2005, Politik Perempuan Bukan Gerhana, Cetakan I, Penerbit Buku Kompas, Jakarta
- Wuryaningsih, Tri, dkk, 2003, Respons Partai Politik terhadap Isu Kuota Perempuan, Fisip Unsoed, Purwokerto
- _____, 2004, Melacak Fenomena Rendahnya Jumlah Calon Anggota Legislatif (Caleg) Perempuan pada Pemilu tahun 2004 di Kabupaten Banyumas, Fisip Unsoed, Purwokerto